

ABSTRAK

Dinamika tata kelola keuangan daerah di Indonesia menunjukkan kompleksitas tersendiri, salah satunya terlihat dari fenomena di Kabupaten Bantul yang secara konsisten meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kuatnya akuntabilitas kelembagaan secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM), transparansi, dan tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara parsial dan simultan. Studi ini memiliki kepentingan akademis dalam memperkaya kajian akuntansi sektor publik melalui integrasi perspektif Teori Kelembagaan, New Public Management, dan Teori Keagenan, serta nilai praktis sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan bagi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada seluruh populasi, yaitu 91 pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 26. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel independen terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD baik secara parsial maupun simultan. Kesimpulan penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan membuktikan bahwa peningkatan kualitas LKPD memerlukan pendekatan holistik yang memadukan penguatan kompetensi SDM, praktik transparansi, dan respons terhadap tekanan eksternal. Implikasi manajerial dari temuan ini adalah perlunya pemerintah daerah merancang program pengembangan kapasitas SDM, optimalisasi platform transparansi informasi keuangan, dan membangun mekanisme yang responsif dengan pemangku kepentingan eksternal.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi SDM, Transparansi, Tekanan Eksternal, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The dynamics of regional financial governance in Indonesia present unique complexities. One notable example is the phenomenon in Bantul Regency, which consistently receives Unqualified Opinion (WTP) on its Local Government Financial Reports (LKPD). However, this achievement does not fully reflect strong institutional accountability in substance. This study aims to analyze the influence of human resource (HR) competency, transparency, and external pressure on the quality of local government financial reports (LKPD), both partially and simultaneously. Academically, this research contributes to the public sector accounting literature by integrating the perspectives of Institutional Theory, New Public Management, and Agency Theory. Practically, it serves as an evaluation and policy formulation basis for local governments. A quantitative survey method was employed. Primary data were collected through questionnaires distributed to the entire population of 91 employees of the Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD) of Bantul Regency. Data were processed using IBM SPSS Statistics version 26. The analysis results demonstrate that all three independent variables have a significant positive effect on LKPD quality, both partially and simultaneously. The study concludes by filling a gap in the literature, proving that enhancing LKPD quality requires a holistic approach that integrates the strengthening of HR competency, transparent practices, and responsiveness to external pressure. The managerial implication of these findings is the necessity for local governments to design sustainable HR capacity development programs, optimize platforms for financial information transparency, and establish responsive mechanisms with external stakeholders.

Keywords: Financial Report Quality, Human Resource Competency, Transparency, External Pressure, Local Government.